

Judul : Arus mudik Nataru, jaga keselamatan, siaga cuaca ekstrem
Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Arus Mudik Nataru Jaga Keselamatan, Siaga Cuaca Ekstrem

ANGGOTA Komisi V DPR Abdul Hadi meminta Pemerintah memperkuat pengawasan keselamatan transportasi di tengah ancaman cuaca ekstrem dalam arus mudik Nataru. Koordinasi lintas sektor wajib dilakukan agar mobilitas ratusan juta orang berjalan aman dan lancar.

Dia menyebut, keberhasilan penanganan Nataru sangat ditentukan kemampuan memadukan keselamatan infrastruktur dengan kualitas pelayanan publik yang humanis. Ego sektoral harus ditinggalkan demi kelancaran operasi di lapangan.

Ramp check atau pemeriksaan menyeluruh sarana transportasi tidak boleh hanya sekadar formalitas. Pemeriksaan kesehatan pengemudi, kapten kapal, pilot, dan masinis harus dilakukan secara rutin. "Untuk menghindari kelelahan yang seringkali jadi penyebab kecelakaan," tegas legislator Fraksi PKS itu.

Faktor berikutnya yang menentukan keberhasilan penanganan Nataru adalah manajemen lalu lintas di titik-titik rawan. Perlu ada pemetaan potensi kemacetan, terutama di kawasan wisata dan perlintasan sebidang, termasuk penertiban truk *over dimension over loading* (ODOL), parkir liar di bahu jalan, serta pasar tumpah yang kerap menghambat arus kendaraan.

"Pemerintah harus memastikan ketersediaan buffer zone guna mengurangi kepadatan saat puncak arus keberangkatan dan kepulangan," tegas politikus asal Nusa Tenggara Barat itu.

Di sektor infrastruktur, Hadi mendesak pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta percepatan preservasi jalan tol dan jalan nasional. Seluruh pekerjaan konstruksi kudu dihentikan sementara selama masa libur untuk mencegah penambahan kemacetan.

Dia juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat diseminasi informasi cuaca, gempa, dan siklon tropis secara cepat serta akurat. Di saat yang sama, kesiapsiagaan Basarnas, baik dari sisi personel maupun peralatan, harus berada pada level tertinggi dengan dukungan tim tanggap darurat yang siaga di wilayah rawan.

"Quick response time bukan jargon, tapi keharusan. Ini wujud kehadiran negara melindungi rakyat yang sedang berlibur," ucapnya.

Anggota Komisi V DPR Teguh Iswara Suardi menambahkan, kesiapan posko terpadu harus benar-benar berbasis analisis dan simulasi risiko, bukan sekadar formalitas administratif. Posko, kata dia, bukan hanya simbol, tapi harus dilengkapi fasilitas memadai. "Termasuk layanan kesehatan bagi ibu hamil dan kelompok rentan karena menyangkut keselamatan nyawa," ucap Teguh.

Untuk urusan pengemudi, sambungnya, perlu ada kantong parkir dan rest area, yang memadai, khususnya di Pulau Jawa sebagai tempat beristirahat. "Kantong parkir dan *rest area* bukan fasilitas tambahan. Itu kebutuhan utama untuk mencegah kecelakaan akibat kelelahan," kata anggota Fraksi Partai NasDem itu. ■ **PYB**